

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Sekolah Dasar di Jakarta Barat masih menghadapi berbagai tantangan serius yang menyebabkan tujuan utama program, yaitu memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, belum tercapai secara optimal. Meskipun bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, implementasi program ini terkendala oleh masalah administratif, koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya manusia, seperti jumlah operator sekolah yang terbatas. Program ini memang berhasil membantu siswa dengan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, namun angka putus sekolah di Jakarta Barat masih tinggi, dan banyak siswa yang seharusnya memenuhi kriteria justru tidak menerima bantuan. Hal ini mencerminkan ketidakefektifan dalam validasi data, sosialisasi prosedur, serta distribusi bantuan. Sementara itu, upaya responsif dari Suku Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya mengatasi masalah koordinasi dan pengelolaan data.

Meskipun telah ada mekanisme seperti aplikasi digital untuk mengelola data penerima, koordinasi yang kurang optimal antara tingkat pusat dan daerah sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam proses verifikasi dan distribusi bantuan. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dengan implementasi di lapangan, terutama di wilayah seperti Jakarta Barat, di mana angka putus sekolah tetap tinggi meskipun program ini telah berjalan. Dampaknya, hak atas pendidikan yang setara dan inklusif bagi seluruh anak di Jakarta Barat, khususnya bagi siswa dari keluarga miskin, belum dapat terpenuhi secara optimal, sehingga hak atas pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi secara merata dan inklusif bagi semua anak di Jakarta Barat. Upaya yang lebih terpadu dan responsif dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan penulis untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pelaksana kebijakan PIP di Jakarta Barat adalah:

1. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puslapdik perlu meningkatkan sistem sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur administrasi PIP, termasuk penyediaan panduan yang jelas untuk orang tua dan siswa. Selain itu, perlu memperkuat mekanisme verifikasi data penerima bantuan untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat menghambat penyaluran bantuan.

2. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat

Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat harus memperbaiki koordinasi antara sekolah, Puslapdik, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan proses pencairan dana berjalan dengan lancar. Sosialisasi kepada sekolah dan orang tua tentang prosedur pencairan bantuan PIP harus lebih intensif, serta memastikan bahwa setiap penerima manfaat mendapatkan informasi yang memadai tentang langkah-langkah yang harus diambil.

3. Operator Sekolah

Operator sekolah perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk mengelola data penerima PIP secara lebih efisien dan akurat. Sekolah harus lebih aktif dalam memberikan informasi kepada orang tua mengenai prosedur pencairan dan mendorong orang tua untuk memastikan akun bank mereka aktif agar dana PIP dapat segera diterima.

4. Orang Tua Siswa

Orang tua siswa diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi terkait bantuan PIP. Sekolah dan instansi terkait harus memberikan panduan yang mudah dipahami dan dapat diakses untuk memastikan orang tua memahami dan mengikuti prosedur yang diperlukan agar anak mereka bisa menerima bantuan PIP.